



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN

(Dari Teori Hingga Empirik)

Baihaqi, M.E

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN
(Dari Teori Hingga Empirik)**

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN (Dari Teori Hingga Empirik)

Baihaqi, ME.



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN (Dari Teori Hingga Empirik)

Penulis:
Baihaqi, ME.

Editor:
Erik Santoso

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : Desember 2023

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
; 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-623-448-411-3

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Implementasi Kebijakan Penurunan Angka Kemiskinan (Dari Teori Hingga Empirik) sesuai yang ditargetka.

Buku dengan judul Implementasi Kebijakan Penurunan Angka Kemiskinan (Dari Teori Hingga Empirik) ini berisikan mengenai bagaimana peran pemerintah dalam neurunkan angka kemiskinan di salah satu Kabupaten di Provinisi Aceh. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

November 2022, Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I TINJAUAN LITERATUR MENGENAI KEMISKINAN	1
A. Pengertian Kemiskinan	1
B. Faktor-Faktor Kemiskinan	4
BAB II KONSEP PENGENTASAN KEMISKINAN	8
A. Konsep Dasar Pengentasan Kemiskinan	8
B. Indikator Kemiskinan	14
C. Teknik Penghitungan Indikator Kemiskinan	15
D. Strategi –Strategi Pengentasan Kemiskinan	16
BAB III KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, APA DAN BAGAIMANA? 18	
A. Pengertian Kesejahteraan	18
B. Tujuan Kesejahteraan Sosial	20
C. Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial	22
D. Konsep Kesejahteraan	24
E. Kesejahteraan dan Kualitas Hidup	26
F. Perspektif Kebijakan Sosial	28
BAB IV PENTINGNYA PERAN PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN	31
A. Pendahuluan	31
B. Penelitian Pendukung	39
C. Kerangka Teori yang Dikembangkan	44
D. Proses Pemecahan Masalah	47
BAB V EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN	52
A. Pengertian Efektivitas	52
B. Indikator Efektivitas	54
C. Gambaran Umum Kabupaten Pidie Jaya (Pijay)	55
D. Peran Pemerintah dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya melalui Instansi terkait	58
1. Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.	59
2. Dinas Sosial Pidie Jaya	64

E.	Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menanggulangi Kemiskinan	77
F.	Kendala yang dihadapi oleh pihak pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menurunkan kemiskinan	82
1.	Sumber Daya Manusia Pidie Jaya	82
2.	Sarana dan Prasarana	87
3.	Minimnya lapangan pekerjaan	88
4.	Kurang Efektif Kinerja Aparatur Negara.	89
5.	Bantuan Yang Tidak Tepat Sasaran	90
	BAB VI PENUTUP	92
	DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

Tinjauan Literatur Mengenai Kemiskinan

A. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia walaupun sering kali tidak disadari, kehadirannya merupakan masalah bagi manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang ada dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam jeratan kemiskinan. Walaupun demikian mereka belum tentu sadar akan kemiskinan yang mereka jalani. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka miliki itu, baru terasa pada waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat taraf kehidupan sosial ekonomi yang lebih tinggi.

Taqyuddinal-Nabhani¹ dalam bukunya *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* menyatakan bahwa kata *faqru* (kemiskinan), menurut bahasa maknanya adalah *ihitiyaj* (membutuhkan). *Iftaqarailaihi* maknanya adalah *ihitaja* (membutuhkan). Ia adalah *faqiir* (orang yang membutuhkan) yang bentuk jamaknya adalah *fuqara'*. Hal ini, karena

¹Taqyuddinal-Nabhani, "*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*", terj. Moh. Maghfur (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). hlm. 228.

seseorang bisa saja membutuhkan sesuatu, sementara dia tidak memiliki sesuatu yang dibutuhkan.

Kemiskinan adalah sebab dan akibat dalam waktu yang sama, yang merupakan serial kesengsaraan yang menimpa semua. Menurut agama kemiskinan adalah perbuatan maksiat yang harus dipertanggung jawabkan oleh individu yang terjebak di dalamnya dan tidak berusaha untuk keluar darinya. Dan merupakan bencana bagi negara yang bertanggung jawab untuk memusnahkannya. Dalam perspektif ilmu-ilmu sosial, seperti yang diungkapkan oleh Wildana Wargadinata.² dalam bukunya *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*. Kemiskinan merupakan suatu standar taraf hidup yang rendah, yaitu adanya suatu bentuk kekurangan materi suatu individu atau yang lainnya dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung akan berpengaruh terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut Ginanjar Kartasasmita³ kemiskinan dapat dilihat dari dua pengertian yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang terpuruk, yang diukur dari tingkat kemampuan keluarga untuk membiayai kebutuhan yang minimal untuk dapat bertahan hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemiskinan relatif adalah perbandingan antara suatu golongan dengan golongan lainnya. Kemiskinan relatif

²WildanaWargadinata, “*Islam dan Pengentasan Kemiskinan*”, (Malang: Uin Maliki Press,2011). hlm,15-16

³Ginanjar Kartasasmita, *Kemiskinan*, (Jakarta: Balai Pustaka.1997) .hlm. 10

adalah tingkat kemiskinan yang sulit dapat dihilangkan karena ada saja orang yang merasa lebih miskin dari orang lain.

Menurut Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti⁴ dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Pembangunan Syariah* kemiskinan dapat di definisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Definisi ini memfokuskan kemiskinan pada ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar konsep kemiskinan semakin jelas maka diperlukan definisi yang standar mengenai batas kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sehingga seseorang atau suatu rumah tangga dapat di kategorikan sebagai orang atau rumah tangga miskin. Penentuan standar kebutuhan hidup inilah yang sesungguhnya menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan ini merupakan sesuatu yang bersifat sangat subjektif. Subjektivitas ini dapat dilihat dari perspektif individu, perspektif sosial, maupun perspektif negara, sehingga kita akan melihat variasi definisi dan standar kebutuhan hidup ini akan berbeda-beda di setiap wilayah di muka bumi.

Dalam konteks Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basicneed*) sebagai dasar pengukuran kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (sandang,

⁴ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, “*Ekonomi Pembangunan Syariah*”, Cet..1, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), hlm. 68

perumahan, pendidikan, dan kesehatan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Karena itu, berdasarkan pendekatan ini, konsep garis kemiskinan (GK) di bangun atas dua pondasi utama, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Garis kemiskinan tersebut adalah standar kebutuhan kalori minimal seseorang adalah setara dengan angka 2.100 kkal /hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya.

Pemahaman mengenai pengertian kemiskinan dilakukan dengan menggunakan tolak ukur. Dengan adanya tolak ukur ini mereka yang tergolong sebagai orang miskin atau yang berada di dalam taraf kehidupan yang miskin dapat di kelompokkan sebagai satu golongan yang dibedakan dari mereka yang tidak miskin. Tolak ukur yang umum dipakai adalah yang berdasarkan tingkat pendapatan per waktu kerja (untuk Indonesia digunakan ukuran waktu kerja sebulan). Dengan adanya tolak ukur ini, maka jumlah dan siapa-siapa yang tergolong sebagai orang miskin dapat diketahui, untuk dijadikan sebagai kelompok sasaran yang harus diperangi kemiskinannya. Tolak ukur yang lain ialah yang dinamakan tolak ukur kebutuhan relatif per keluarga, yang batasan-batasannya dibuat berdasarkan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi sebuah keluarga agar dapat melangsungkan kehidupannya secara sederhana tetapi memadai sebagai warga masyarakat yang layak.⁵

B. Faktor-Faktor Kemiskinan

Adapun penyebab terjadinya kemiskinan yang sering jumpai dikalangan masyarakat telah dikemukakan oleh

⁵ Parsudi Suparlan, "*Penyunting Kemiskinan di Perkotaan*", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.1995), hlm.11

Wildana Wargadinata⁶ bahwa sebab-sebab terjadinya kemiskinan terkait dengan model interaksi antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dengan alam dan dengan masyarakatnya. Sebab-sebab kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi alam terjadi bila dilakukan pola destruktif antara manusia dengan alam seperti eksploitasi alam tanpa melakukan analisis dampak lingkungan, kecenderungan untuk menghabiskan seluruh potensi alam, keengganan mengadakan peremajaan demi kelanjutan alam, dan lain-lain. Selanjutnya akibat yang terjadi dari interaksi tersebut ialah kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi manusia itu sendiri ialah kurangnya percaya pada kemampuannya, keengganan mengaktualisasikan potensi yang ada dalam bentuk kerja nyata yang serius, serta kurangnya respek optimal terhadap perputaran waktu. Sedangkan salah satu sebab kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi sosial, ialah terkonsentrasinya modal di tangan orang-orang kaya. Dengan bertumpuknya modal di tangan mereka mengakibatkan orang-orang fakir tidak memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan potensi-potensi demi meraih prestasi di bidang ekonomi.

Loekman Soetrisno⁷ mengutip pendapat Robert Chambers seorang ahli pembangunan pedesaan kebangsaan Inggris, menyatakan bahwa kemiskinan yang di alami oleh rakyat negara sedang berkembang, khususnya rakyat

⁶Wildana Wargadinata, *“Islam dan Pengentasan Kemiskinan”*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011). hlm. 19-21

⁷Loekman Sutrisno, *“Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan”* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm.18

pedesaan, disebabkan oleh beberapa faktor yang disebut sebagai tidak beruntungan atau *disadvantage* yang saling terkait satu sama lain.

Menurut Robert Chambers ada lima “tidak beruntungan” yang melingkari kehidupan keluarga miskin, yaitu: *Pertama*, kemiskinan (*poverty*), situasi orang miskin mempunyai tanda-tanda sebagai berikut. *Pertama*, rumah mereka reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim, dan tidak memiliki MCK sendiri. *Kedua*, pendapatan mereka tidak menentu dan sangat rendah.

Kedua, fisik yang lemah (*physical weakness*), kelemahan fisik keluarga miskin disebabkan beberapa hal seperti tidak adanya laki-laki sehat yang menjadi kepala keluarga, sehingga keluarga terpaksa dikepalai oleh seorang perempuan yang disamping bekerja mengurus pekerjaan rumah juga harus bekerja menghidupi keluarga. Akibatnya keluarga miskin lemah fisik akibat rendahnya gizi, beban kerja terlalu berat dan interaksi bibit berbagai penyakit akibat kemiskinan.

Ketiga, keterasingan (*isolation*), kelompok miskin akan terasing karena tempat tinggalnya yang secara geografis terasing, atau karena mereka tidak mempunyai akses terhadap sumber-sumber informasi.

Keempat, kerentanan (*vulnerability*). Dalam menghadapi paceklik keluarga miskin mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dengan menjual barang-barang yang dimiliki dan laku dijual, utang pada tetangga yang lebih mampu, atau mengurangi makan mereka baik dari segi jenis atau frekuensinya. Keadaan darurat membuat tidak hanya keluarga miskin menjadi lebih miskin tetapi juga radang dari berbagai penyakit, tidak jarang dapat membawa kematian.

Kelima, tidak berdayaan (*power lessness*). Orang miskin tidak berdaya untuk menghadapi rentenir atau orang-orang lain yang sering mengeksploitasi mereka. Mereka juga tidak berdaya untuk menghadapi polisi atau aparat negara lainnya yang sering tidak ramah pada mereka.

Selanjutnya penyebab kemiskinan yang dikemukakan oleh Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti⁸ dalam bukunya *Ekonomi Pembangunan Syariah* bahwa setidaknya ada empat penyebab kemiskinan. *Pertama*, faktor individual, dimana seseorang menjadi miskin karena faktor pribadinya, seperti cacat permanen yang menyebabkan ia menjadi miskin. *Kedua*, faktor sosial, dimana kemiskinan terjadi akibat distriminasi sosial yang dilakukan. *Ketiga*, faktor kultural, dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya, seperti malas untuk bekerja dan berusaha. *Keempat*, faktor struktural, di mana kemiskinan terjadi karena akibat tidakadilan sistem ekonomi.

Dalam perspektif syariah, terjadi perbedaan pendapatan yang menjadi penyebab kemiskinan sesungguhnya merupakan *sunnatullah fil hayah*. Keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda-beda penghasilan sesungguhnya tidak bisa dinafikan. Karena itu, Islam tidak pernah berbicara mengenai bagaimana upaya untuk “menghilangkan” kemiskinan, tetapi berbicara bagaimana mereduksi dan meminimalisirkan kemiskinan ini agar kehidupan yang lebih sejahtera bisa diraih. Caranya adalah dengan mengembangkan sikap saling tolong-menolong, saling membantu, saling bersilaturahmi, saling mengisi dan saling bersinergi.

⁸Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, “*Ekonomi Pembangunan Syariah*”, Ed.1, (Jakarta: Rajawali Pers,2016). hlm. 70-72

BAB II

Konsep Pengentasan Kemiskinan

A. Konsep Dasar Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan selalu menjadi agenda utama bagi negara-negara berkembang khususnya di Indonesia. Pengentasan kemiskinan selalu menjadi topik utama dalam setiap periode pemerintahan. Hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan permasalahan yang menyangkut keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam rangka mengentas kemiskinan, Indonesia maupun negaranegara berkembang yang lainnya telah menggunakan teori-teori ekonomi yang ada, baik itu mengadopsi dari pemikiran barat maupun dari nasional sendiri. Teori-teori yang sudah digunakan maupun yang masih berupa wacana antara lain sebagai berikut:

Teori Anggaran pro kaum miskin Anggaran pro kaum miskin adalah penganggaran berdasarkan penilaian kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan proses yang melibatkan kelompok miskin untuk ikut menentukan skala prioritasnya. Dalam pengertian lain, anggaran pro kaum miskin dimaknai sebagai sebuah penganggaran yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat khususnya kelompok masyarakat miskin melalui proses yang adil, partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel.⁹ Teori ini menawarkan solusi penanggulangan kemiskinan dengan bertolak pada akar masalah kemiskinan itu sendiri. Definisi di atas menghasilkan sebuah pandangan yang melihat anggaran

⁹ Joe Fernandez, *„Anggaran Pro Kaum Miskin: Konsep dan Praktik’*, dalam *Anggaran Pro kaum Miskin: Sebuah upaya menyejahterakan kaum miskin*, ed. Abdul Waidl dkk, (Jakarta: LP3ES, 2009), 15.

negara sebagai instrumen pemberdayaan. Sedangkan proses penganggaran itu sendiri di pandang sebagai proses politik di mana partisipasi kaum miskin mutlak diperlukan, sekalipun demokrasi perwakilan telah berjalan. Untuk dapat memahami anggaran pro kaum miskin ini, tidak hanya soal logika anggaran dan penganggaran, tetapi juga memahami kemiskinan yang memiliki dimensi jauh lebih luas dari pada sekedar pendapatan yang rendah.

Adapun konsep pengentasan kemiskinan yang sekaligus menjadi solusi bagi usaha pengentasan kemiskinan yang telah di cetus oleh Yusuf Qaradhawi yaitu ada tiga unsur pokok sebuah masyarakat berbangsa dan bernegara yaitu, 1) individu, 2) masyarakat, dan 3) Negara. Sarana yang menyangkut individu adalah bekerja, sedangkan sarana yang menyangkut masyarakat adalah:

- a. Memberi nafkah kepada karib kerabat.
- b. Menghormati dan menjaga hak tetangga.
- c. Mengeluarkan zakat secara sukarela.
- d. Mengeluarkan kewajiban selain zakat dari harta yang dimiliki seperti membayar denda, nazar serta membantu orang yang sedang dalam kesusahan.
- e. Memberikan sedekah secara sukarela seperti amal jariyah, zakat dan lain-lain.

Dan sarana yang menyangkut unsur negara adalah jaminan *Baitul Mal* negara, yaitu kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin yang membutuhkan, baik dari kalangan muslim ataupun *dzimmi* (non muslim yang hidup di bawah naungan pemerintahan Islam). Selanjutnya Yusuf Qaradhawi menjabarkan pula dalam enam sarana pengentasan kemiskinan yang telah diteliti dari bukunya

*Faqrwa Kaifa 'Aalajahaal-Islam.*¹⁰ Ke enam sarana tersebut sebagai berikut:

1. Bekerja

Bekerja merupakan salah satu usaha yang dilakukan seseorang atau bersama orang lain untuk memproduksi barang dan jasa. Bekerja seperti ini yang diharapkan menjadi senjata untuk memerangi kemiskinan. Bekerja adalah faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur terpenting untuk kemakmuran bumi, yang juga merupakan tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Menurut Qaradhawi¹¹ ketika menciptakan bumi, Allah sekaligus memberikan berkah kepadanya. Ia menakar makanan segenap makhluk hidup yang hidup di bumi lalu meletakkan berkah sekaligus kebaikan yang melimpah diperut bumi dan diatasnya.

2. Jaminan Sanak Famili

Untuk mengangkat harkat manusia, Islam memiliki syari'at yang orisinil dan jelas yaitu bekerja. Akan tetapi, ada beberapa kenyataan manusia-manusia yang tidak mampu bekerja seperti anak-anak kecil, orang yang lemah, orang tua renta, orang sakit atau cacat atau mereka yang tertimpa bencana sehingga mereka tidak mampu untuk bekerja. Menghadapi masalah seperti ini, Islam bertekad mengangkat dan menyelamatkan mereka dari lembah kemiskinan serta mencegah dari perbuatan mengemis dan meminta-minta. Islam membuat peraturan yang berkaitan dengan solidaritas antar anggota keluarga.

¹⁰ Yusuf Qaradhawi, "*Faqr wa Kaifa 'Aalajaha al-islam*", (Cet.5, Kairo: Maktabah Wahbah.1986).hlm.

¹¹Yusuf Qaradhawi (1995), Op.Cit., hlm.51

3. Zakat

Tidak semua orang miskin mempunyai kerabat. Apa yang dapat dilakukan mereka yang lemah seperti anak yatim, para janda, ibu yang sudah tua renta, ayah yang sudah uzur, orang-orang cacat, sedang mereka tidak mempunyai sanak saudara. Islam tidak pernah melupakan mereka, secara tegas dan pasti Islam telah menentukan hak mereka dalam harta orang berada yaitu berupa zakat. Jadi tujuan utama zakat adalah menghapus kemiskinan. Adapun ayat yang menerangkan kedudukan zakat sebagai berikut:

Dalam Surah al- Mukminun ayat 1-4:



Artinya: “Beruntunlah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang kusyuk dalam shalatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat.”¹³

Allah adalah pemilik segala harta yang sebenarnya, sedangkan manusia hanyalah pemegang amanat. Kesediaan manusia membayar zakat adalah pengakuan kepada kekuasaan mutlak. Islam tidak menempatkan masalah zakat sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai salah satu tugas pemerintahan Islam. Dalam hubungan ini, Islam menyerahkan

¹² Q.S. Al-Mukminun: 1-4

¹³Departemen Agama RI, “*Alqur’an dan Terjemahannya*”, (Madinah al Munawwarah: Mujamma’ Malik Fahd,1411H). hlm.526